

ISSN 2828-285x



Direktorat
Kajian Strategis
dan Reputasi Akademik



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 2 Tahun 2025

Menavigasi Deforestasi Uni Eropa: Peta
Kepatuhan Berkeadilan bagi Kakao,
Sawit, dan Kopi Indonesia

Penulis

Obi Pratama^{1,2}

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, International Women University

² Scala Cita Indonesia (ScalaEdu)

Menavigasi Deforestasi Uni Eropa: Peta Kepatuhan Berkeadilan bagi Kakao, Sawit, dan Kopi Indonesia

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) EUDR mengancam akses pasar Uni Eropa bagi komoditas tropis Indonesia jika tidak segera disiapkan sistem kepatuhan nasional.
- (b) Tiga juta lebih petani kecil berisiko tersingkir karena keterbatasan akses teknologi *traceability*.
- (c) Belum ada strategi lintas-kementerian yang terkoordinasi untuk membangun peta jalan kepatuhan yang inklusif.
- (d) Diplomasi dagang Indonesia belum mengoptimalkan pendekatan kolektif kawasan ASEAN dalam menanggapi regulasi ini.
- (e) Indonesia membutuhkan solusi kebijakan yang menjamin keberlanjutan sekaligus keadilan bagi petani dan pelaku ekspor.

Ringkasan

Penerapan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan mengubah peta perdagangan global bagi komoditas tropis seperti kakao, sawit, dan kopi—tiga produk utama ekspor Indonesia yang melibatkan jutaan petani kecil. Dalam skema baru ini, setiap produk yang masuk ke pasar Eropa harus bebas dari jejak deforestasi, terverifikasi, dan dapat ditelusuri hingga ke lokasi produksi. Tantangan utama Indonesia bukan sekadar teknis, tetapi struktural: lemahnya sistem *traceability*, tumpang tindih regulasi domestik, serta minimnya skema perlindungan bagi produsen skala kecil. Jika tidak disiapkan dengan strategi yang terkoordinasi, EUDR berpotensi menciptakan hambatan dagang non-tarif yang eksklusif dan memperlebar kesenjangan dalam rantai pasok global. *Policy brief* ini menawarkan peta kepatuhan berkeadilan yang tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjamin partisipasi setara dari petani lokal dalam arsitektur ekspor masa depan Indonesia.

Kata kunci : Diplomasi Dagang, EUDR, Petani Kecil, *Traceability* Komoditas

Pendahuluan

Regulasi Deforestasi Uni Eropa (*European Union Deforestation Regulation*, EUDR) yang disahkan pada 2023 mewajibkan seluruh produk kakao, sawit, dan kopi yang memasuki pasar Eropa bebas dari jejak deforestasi sejak 31 Desember 2020 serta dapat ditelusuri hingga titik koordinat lahan pada tingkat parsel kebun (*farm-level*). Ketentuan *due diligence* ini akan berlaku penuh mulai pertengahan 2026 setelah masa transisi. Bagi Indonesia yang merupakan pemasok kelapa sawit terbesar dunia serta produsen kakao dan kopi utama di Asia, persyaratan baru ini merupakan titik balik strategis sekaligus ancaman serius bagi ketahanan ekspor (European Commission 2023).

Tantangannya bersifat berlapis. Pertama, struktur produksi ketiga komoditas tersebar secara luas: sekitar enam juta petani kecil mengelola lebih dari 60 % areal tanam nasional, namun hanya seperempat lahan yang sudah terpetakan secara geospasial dan kurang dari 10 % petani memiliki sertifikasi berkelanjutan. Kedua, Eropa masih menyerap porsi penting ekspor yaitu ± 25 % minyak sawit olahan, 32 % biji kakao, dan 40 % kopi arabika Indonesia. Ketiga, regulasi domestik mengenai data perkebunan tersebar di berbagai kementerian, menyebabkan duplikasi dan kesenjangan informasi. Tanpa sistem *traceability* terpadu, biaya kepatuhan dapat melonjak, mendorong pelaku industri besar melakukan *cut-off* pemasok skala kecil dan memperlebar ketimpangan di rantai pasok global (BPS 2024).

Policy brief ini bertujuan memetakan langkah kepatuhan yang tidak hanya memenuhi standar EUDR, tetapi juga menegakkan asas keadilan bagi petani, industri, dan pemerintah. Dengan memadukan lensa hubungan internasional, kebijakan publik, dan studi pembangunan, dokumen ini: (1) mengidentifikasi celah institusional dan teknologi dalam penelusuran rantai pasok; (2) menilai potensi instrumen fiskal

dan digital untuk menekan biaya kepatuhan; dan (3) menawarkan kerangka diplomasi dagang berbasis solidaritas ASEAN guna menghindari hambatan non-tarif baru.

Apabila langkah terkoordinasi tidak segera diambil, Indonesia berisiko kehilangan pasar senilai miliaran dolar, mengalami pengalihan beban kepatuhan ke petani kecil, dan kehilangan momentum kepemimpinan iklim di kawasan. Urgensi reformasi *traceability* nasional dan harmonisasi kebijakan lintas-kementerian tidak pernah sepenting saat ini.

Lanskap Aktor dan Struktur Rantai Pasok

Rantai pasok sawit, kakao, dan kopi Indonesia bersifat multilapis: petani kecil (≈ 6 juta kepala keluarga) menanam di lahan rata-rata < 2 ha; koperasi desa dan pengepul regional menghubungkan produk primer ke pabrik pengolah; eksportir besar—sering bagian dari konglomerat agro-industri—menangani kontrak Eropa. Data BPS (2024) menunjukkan nilai ekspor bruto *free on board/FOB*—mencakup bahan mentah (HS 180100, 090111) dan produk olahan/*refined* (HS 151190)—mencapai USD 18,4 miliar, meningkat ± 12 % dibanding 2020. Uni Eropa menyerap 25 % minyak sawit olahan, 32 % biji kakao, dan 40 % kopi arabika. Struktur ini menimbulkan asimetri kekuatan tawar: perusahaan hulu mulai berinvestasi dalam modul *due-diligence* EUDR, sebagaimana tercermin dalam belanja modal *geotraceability* pada *ESG Report* Astra Agro Lestari (2024) dan komitmen peta kebun digital Bumitama Agri (2023). Sementara itu, petani kecil masih bergantung pada rantai pembeli yang menentukan standar keterlacakkan dan legalitas lahan. Akibat perbedaan kapasitas tersebut, risiko *cut-off* pemasok rakyat kian tinggi jika skema kepatuhan nasional tidak segera dibangun secara inklusif.



Gambar 1. Tren ekspor Indonesia ke Uni Eropa untuk komoditas kelapa sawit, kakao-biji, dan kopi selama lima tahun terakhir (2020–2024)

Gambar 1 menunjukkan tren ekspor Indonesia ke Uni Eropa selama lima tahun terakhir (2020–2024) untuk ketiga komoditas tersebut. Penurunan bertahap nilai ekspor sawit sejak 2022 mengindikasikan efek awal dari kampanye pengurangan deforestasi Eropa, sementara tren naik pada kopi dan fluktuasi kakao memperlihatkan dinamika yang perlu dicermati dalam strategi kepatuhan nasional.

Grafik tren lima tahunan ekspor Indonesia ke Uni Eropa (2020-2024) untuk kelapa sawit, kakao-biji, dan kopi sudah ditampilkan di atas. Nilai ditarik dari basis data statistik perdagangan komoditas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *UN*

Comtrade/ World Integrated Trade Solution (WITS) untuk komoditas sawit olahan (HS 151190), kakao biji (HS 180100) dan kopi hijau (HS 090111) serta dikonversi ke juta USD (Tabel 1). Interpretasi cepat (UN Comtrade 2024) dari tabel 1 yaitu :

- Sawit melonjak 2021, cenderung turun pasca-2022 sejalan dengan kampanye substitusi UE.
- Kopi terus meningkat kecuali koreksi 2023, menandakan permintaan spesialti dan niche tetap kuat.
- Kakao bernilai kecil tetapi volatil; lonjakan 2023 merefleksikan stok ulang pabrik Eropa sebelum ketentuan *due-diligence* lebih ketat.

Tabel 1. Tabel 1. Nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa tahun 2020-2024 (FOB, juta USD)

Tahun	Sawit	Kakao	Kopi
2020	1 047	0,71	159
2021	2 084	0,33	182
2022	2 008	0,38	277
2023	1 675	2,44	198
2024	1 244	0,88	241

Bottleneck Traceability dan Sertifikasi di Tingkat Petani Kecil

Pada 2024, hanya 10 % perkebunan rakyat terdaftar dalam sistem SMART-SE (platform data Kementerian); sisanya menggunakan catatan manual atau tidak terdokumentasi. Sertifikasi berkelanjutan (ISPO, RSPO, RA) rata-rata memerlukan biaya awal USD 35–50/ha. Angka tersebut setara satu setengah kali pendapatan bulanan petani sawit mandiri. Hambatan lain menurut RSPO (2024) diantaranya:

1. Teknologi – akses internet dan listrik di sentra kakao Sulawesi Tengah dan kopi Toraja masih <70 %.
2. Kelembagaan – peraturan geospasial diatur terpisah oleh Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kementerian Pertanian sehingga terjadi duplikasi data lahan.
3. Keuangan – bank menilai sertifikasi EUDR sebagai *cost centre* sehingga suku bunga kredit mikro tidak berubah. Akibatnya, pelaku hilir cenderung “mencuci” deforestasi lewat *blending* atau hanya membeli dari perkebunan besar sehingga mendorong eksklusi pasar petani kecil. Dari perspektif studi pembangunan, hal ini memperdalam ketimpangan pedesaan serta memutarbalikkan narasi “keberlanjutan” menjadi sekadar hambatan non-tarif.

Ketimpangan Global dan Pelajaran dari Selatan

Pengalaman Kolombia dan Ghana menawarkan pelajaran relevan dalam hal pendanaan sistem keterlacakkan serta penguatan peran koperasi lokal. Kolombia, melalui program *Single Window for Foreign Trade* (VUCE), mengintegrasikan data satelit IDEAM, sertifikasi RSPO, dan pajak karbon yang membiayai platform lewat pendapatan pungutan ekspor/export levy. Hasilnya, 85 % ekspor minyak sawit terverifikasi penuh pada 2023. Ghana Cocoa Board menerapkan

CocoaTrace yang menugaskan koperasi menggunakan GPS murah; biayanya ditutup oleh *export levy* 1 %. Dua contoh ini menunjukkan bahwa insentif fiskal berpadu kewajiban pengiriman data dapat menekan beban petani dan memutihkan rantai pasok (Ministerio de Comercio 2023; RSPO 2024) (Ghana Cocoa Board 2023).

Bagi Indonesia, tiga implikasi kebijakan hubungan internasional muncul:

- Negosiasi Blok ASEAN—membangun posisi tawar kolektif agar UE mengakui *phased compliance* sampai 2030 bagi petani kecil.
- Diplomasi Iklim Selatan-Selatan—menggandeng Brasil dan Pantai Gading membentuk *producer caucus* untuk menekan tarif kompensasi hijau.
- Skema Pembiayaan Campuran—mengundang dana iklim (*Green Climate Fund/GCF*) dan bank pembangunan (*Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB*) menanggung pembaruan sistem digital traceability.

Arah Kebijakan

Analisis di atas menegaskan logika keadilan transisi: standar lingkungan global hanya legitim jika mekanisme pembiayaan dan teknologi turut menurunkan beban petani. Indonesia harus mengintegrasikan sistem keterlacakkan digital, skema insentif fiskal, dan strategi diplomasi multilateral agar regulasi seperti EUDR tidak menjadi hambatan, melainkan katalisator transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan inklusif (World Bank 2024).

Rekomendasi

1. Luncurkan FarmTrace-ID mulai Q3 2025. Kementerian Pertanian memulai pilot di sepuluh provinsi sawit-kakao-kopi pada Agustus 2025, lalu memperluas ke nasional paling lambat Juli 2026. Sistem terintegrasi Kementerian ATR/BPN & citra LAPAN; petani

menerima kode QR kebun gratis melalui balai penyuluhan digital.

2. Bentuk ASEAN *Deforestation Task Force* Juli 2025. Kementerian Luar Negeri memimpin penyusunan posisi bersama untuk pertemuan Komite Perdagangan UE-ASEAN Februari 2026, menuntut *phased compliance* petani kecil hingga 2030 dan pengakuan ISPO+ sebagai standar ekuivalen. Jika negosiasi stagnan, ajukan isu transparansi non-tarif ke WTO pertengahan 2026.
3. Aktifkan insentif fiskal inklusif mulai September 2025. Pemerintah menawarkan *export-levy rebate* 1 % bagi koperasi tersertifikasi FarmTrace-ID dan menyiapkan dana campuran Rp 2 triliun (BPDLH + GCF) untuk pemetaan lahan, GPS, dan pelatihan. Eksportir wajib menyisihkan 0,2 % nilai FOB ke dana pendampingan agar biaya kepatuhan tidak dialihkan ke petani kecil (BPDLH 2024).

Ketiga langkah ini harus bergerak simultan sejak paruh kedua 2025 agar Indonesia siap memenuhi EUDR tanpa menyingkirkan jutaan produsen skala kecil.

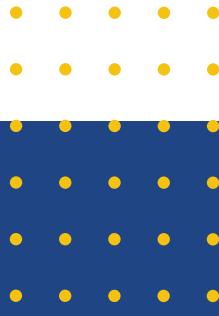
Kesimpulan

Kerangka kepatuhan Indonesia terhadap EUDR masih terfragmentasi, bertumpu pada sertifikasi sukarela dan basis data perkebunan yang tersebar di berbagai kementerian. Pendekatan ini bersifat reaktif, menugasi industri besar untuk menambal celah regulasi sambil menempatkan beban biaya pada petani kecil. Akibatnya, peluang kehilangan pasar bernilai miliaran dolar semakin nyata, sekaligus menurunkan kredibilitas diplomasi iklim Indonesia. Saatnya beranjak dari skema "*compliance by corporation*" menuju sistem *traceability* digital terpadu yang didukung insentif fiskal dan pendanaan campuran. Di ranah eksternal, Indonesia perlu memimpin koalisi ASEAN-Global South agar standar keberlanjutan global disertai mekanisme transisi yang adil. Tanpa reformasi menyeluruh, EUDR akan menjadi hambatan non-

tarif permanen, bukan katalis pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Daftar Pustaka

- [BPDLH] Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. 2024. *Laporan Tahunan BPDLH 2023: Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup untuk Perubahan Iklim*. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2024*. Jakarta (ID): BPS.
- [European Commission] 2023. Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. Brussels (BE): *Official Journal of the European Union*.
- Ghana Cocoa Board. 2023. *CocoaTrace Progress Report 2023*. Accra (GH): Ghana Cocoa Board.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 2023. *Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) Sustainability Dashboard 2022*. Bogotá (CO): MinCIT.
- [RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2024. *RSPO Certification Impact Report 2024*. Kuala Lumpur (MY): RSPO Secretariat.
- [UN Comtrade] United Nations Commodity Trade Statistics Database. 2024. *International trade statistics for Indonesia: HS 151190, HS 090111, HS 180100 (2020-2024)*. New York (US): United Nations.
- World Bank. 2024. *Indonesia Economic Prospects: Green Growth and Trade*. Washington (DC): World Bank.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Obi Pratama, merupakan dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, International Women University. Kepakarannya adalah dalam bidang tata kelola keberlanjutan, perdagangan global, dan diplomasi ekonomi. Ia juga merupakan pendiri dari Scala Cita Indonesia (ScalaEdu) (**Corresponding Author**)
Email: obipratama@iwu.ac.id



ISSN 2828-285X



Telepon
+62 811-1183-7330



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680